

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

1. ADITYA KUSUMA ADMAJA (2006), Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Dengan judul penelitian “Peranan Badan Keswadayaan (BKM) dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di kecamatan Jombang Kabupaten Jombang (Study Deskriptif Kualitatif pada BKM “ Sengon Sejahtera “ Di Desa Sengon Kecamatan Jombang) “. Maka hasil dari penelitian ini adalah pengawasan dalam pemanfaatan dana bantuan P2KP yang diberikan oleh BKM “ Sengon Sejahtera “ dilakukan secara berkala oleh KSM yang dilaporkan pada BKM “Sengon Sejahtera” berupa LPJKK (Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dan Kegiatan), dan dalam menumbuhkan pemberdayaan masyarakat, BKM “Sengon Sejahtera” memberikan pelatihan keahlian yang bekerja sama dengan pihak / instansi lain, adapun pelatihan yang diberikan mencakup 4 hal yaitu : Pelatihan kerupuk, Airbrush, Bordir dan Manajemen bagi Ketua KSM. Sebagai bukti bahwa masyarakat miskin telah mengikuti pelatihan keahlian, oleh BKM “Sengon Sejahtera” akan diberikan sertifikat sesuai dengan jenis pelatihan yang diikuti.

Perbedaan dan persamaan dari penelitian ini antara lain, untuk perbedaan dalam penelitian ini yang pertama adalah tujuan penelitian, dimana Peranan Badan Keswadayaan (BKM) dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di kecamatan Jombang Kabupaten Jombang sedangkan dalam penelitian sekaran terdapat tujuan untuk mengetahui peranan BUMDes didalam memberdayakan masyarakat di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Untuk persamaan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian dimana sama- sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

2. M. ALI IMRON, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya (2002), Peran Institusi Lokal Dalam Pembangunan Desa (Suatu Kajian Tentang Peran Lembaga Tahlil Dalam Pembangunan Desa di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro). Komisi Pembimbing, Ketua: Dr. H.R. Riyadi Soeprapto, MS., Anggota : Drs. Suwondo, MS. Menguatnya institusi lokal tradisional keagamaan semisal Lembaga Tahlil dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat akhir-akhir ini adalah merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik untuk di cermati. Institusi lokal keagamaan yang banyak berkembang dalam masyarakat desa yang terkesan tradisional ini ternyata dalam tataran realita mampu berperan sebagai sarana yang sangat potensial dan efektif dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini dibuktikan dengan berbagai aktifitas pembangunan yang telah dilakukan baik berupa pembangunan sarana maupun prasarana fisik desa secara mandiri. Disisi lain LKMD sebagai

lembaga formal yang notabenenya lembaga buatan pemerintah sebagai wadah kegiatan pembangunan desa justru mengalami kemunduran dan tidak mampu untuk berbuat banyak dalam pembangunan desa. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan langkah-langkah pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara yang mendalam dengan informan lapangan yang diperoleh melalui Key Informan.

Dari hasil penelitian yang ada akhirnya dapat ditarik beberapa indikasi pokok, yaitu: (1) Keberadaan sebuah institusi lokal ditentukan oleh kesesuaian dengan nilai-nilai agama dan budaya setempat serta seberapa besar institusi tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, (2) Partisipasi masyarakat akan semakin meningkat bila pembangunan menggunakan media lembaga tradisional yang ada, (3) Institusi/lembaga yang berlandaskan pada adat istiadat setempat adalah sarana yang potensial bagi pembangunan masyarakat.

Perbedaan dan persamaan dari penelitian ini antara lain, untuk perbedaan dalam penelitian ini yang pertama adalah tujuan penelitian, dimana Peran Institusi Lokal Dalam Pembangunan Desa (Suatu Kajian Tentang Peran Lembaga Tahlil Dalam Pembangunan Desa di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro) sedangkan dalam penelitian sekaran terdapat tujuan untuk mengetahui peranan BUMDes didalam memberdayakan masyarakat di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi

Kabupaten Mojokerto. Untuk persamaan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian dimana sama- sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

2.2 Landasan Teori

Di dalam cara berpikir secara ilmiah, teori sangat dibutuhkan sekali sebagai tolok ukur berpikir maupun bertindak karena teori merupakan suatu kebenaran yang sudah dibuktikan kebenarannya, walaupun mempunyai keterbatasan waktu dan tempat. Adapun tujuan landasan teori ini adalah untuk memberikan suatu landasan berpikir kepada penulis dalam usahanya untuk mencari kebenaran yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dimana hasilnya.

2.2.1 Peran

2.2.1.1 Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Sorjono Soekanto (2002:243) merupakan aspek dinamisi kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Konsep tentang peran (role) menurut Komarudin (1974;768) dalam buku “Ensiklopedia Manajemen” mengungkapkan sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.

2.2.2 Kebijakan Publik

2.2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik menurut Chandler & Piano (1998) dalam Tangkilisan (2003 : 1) adalah pemecahan masalah-masalah publik atau pemerintah. Pendapat lain dikemukakan oleh Dye dalam Islamy (1997 :18) yaitu kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nugroho (2003 : 54) mendefinisikan kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. Kesimpulan dari ketiga teori diatas yaitu suatu tujuan yang dilakukan atau tidak dilakukan di dalam lingkup aparatur pemerintah terhadap suatu kebijakan yang telah ditetapkan..

Sedangkan Friedrich dalam Wahab (2004 : 3), menyatakan bahwa kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang

diinginkan. Pernyataan Friedrich ini sejalan dengan pernyataan Anderson dalam Agustino (2006 : 7) memberikan statement tentang kebijakan publik yaitu serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Dari pernyataan dari teori diatas bisa dilihat bahwa suatu kebijakan publik tidak luput dari peran seseorang atau sekelompok orang didalam pencapaian kebijakan publik.

Sedangkan menurut Woll (1996) dalam Heseel (2003 : 2) kebijakan publik adalah sejumlah aktifitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pendapat Woll ini sependapat dengan Easton dalam Islamy (1997 : 19) yaitu pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat, dan definisi kebijakan publik menurut Frederich dalam Soenarko (2000 : 42) adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatan yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi suatu cita-cita atas mewujudkan suatu kehendak serta tujuan tertentu.

Atas dasar pengertian diatas, maka dapat dikemukakan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Anderson dalam Islamy yang antara lain mencakup :

1. kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.

2. kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
4. kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan, pemerintah mencari masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif)

Dari beberapa pengertian diatas dan mengikuti paham bahwa kebijakan publik itu harus mengabdikan kepada masyarakat, maka dengan demikian dapat disimpulkan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

2.2.2.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Agustino (2006 : 22) berpendapat bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu. Oleh karena itu kebijakan publik dilakukan ke dalam beberapa tahap proses pembuatan kebijakan sebagai berikut :

1) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah – masalah ini berkompetensi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan.

2) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan di bahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah–masalah tadi di definisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik.

3) Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternative kebijakan yang di tawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut di adopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan–catatan elit, jika program tersebut tidak di implementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah seharusnya di implementasikan.

5) Tahap penilaian kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau di evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

2.2.2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang akan dirumuskan maka hanya menjadi wacana. Oleh karena itulah implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik.

Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood dalam Hesel (2003:17) hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Presman dan Wildavsky dalam Hesel (2003: 17) implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

Sedangkan Jones dalam Hesel (2003:17) menganalisis masalah pelaksanaan kebijakan dengan mendasarkan pada konsepsi kegiatan-kegiatan fungsional. Jones mengemukakan beberapa dimensi dari implementasi pemerintahan mengenai program-program yang sudah disahkan, kemudian menentukan implementasi, juga membahas aktor-aktor yang terlibat, dengan memfokuskan pada birokrasi yang merupakan lembaga eksekutor. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan.

2.2.2.4 Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Menurut Rippley dan Franklin dalam Tangkilisan (2003 : 21) menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga faktor, yaitu :

1. Perspektif kepatuhan yang mengukur implementasi kebutuhan aparatur pelaksana.
2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.
3. Implementasi yang berhasil mengarah pada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

2.2.2.5 Kegagalan Implementasi Kebijakan

Menurut Peters dalam tangkilisan (2003 : 22) mengatakan implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa faktor yaitu:

1. Informasi
Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada pra pelaksana dari kebijakan yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil dari kebijakan.
2. Isi Kebijakan
Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau kebijakan atau ketidaktepatan dan ketidaktegaasan intern

maupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

3. Dukungan

Akan implementasi kebijakan publik akan sangat sulit apabila pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

4. Pembagian Potensi

Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor implementasi dan juga mengenal organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang.

2.2.3 Pemberdayaan Masyarakat

2.2.3.1 Pengertian Pemberdayaan

Menurut Edi Suharto (2009:58) pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Parsons dalam Edi Suharto (2009:58) pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk

berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Menurut Rappaport dalam Edi Suharto (2009:59) pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial.

2.2.3.2 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Kartasmita dalam Mashoed (2004 : 46) pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Menurut Wrihatnolo (2007: 75) pemberdayaan masyarakat adalah unsur- unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (survive) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Pemberdayaan ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya meningkatkan kualitas, harkat, martabat, masyarakat melalui proses perencanaan, pendidikan dan penelitian untuk memandirikan serta memampukan masyarakat untuk lepas dari kemiskinan.

2.2.3.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Jamasy (2004:42) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat mutlak bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan. Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Menekan perasaan ketidak berdayaan masyarakat miskin bila berhadapan dengan struktur social politik. Langkah konkritnya adalah meningkatkan kesadaran kritis pada posisinya.
2. Memutuskan hubungan yang bersifat eksploitatif lapisan orang miskin perlu dilakukan bila terjadi reformasi social, budaya dan politik (artinya biarkan kesadaran kritis masyarakat miskin muncul dan biarkan pula mereka melakukan reorganisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas hidupnya).

3. Tertanam rasa persamaan (egalitarian) dan berikan gambaran bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir, tetapi sebagai penjelmaan konstruksi social.
4. Merealisasikan perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh.
5. Pembangunan social dan budaya bagi masyarakat miskin.
6. Distribusi Infrastruktur yang lebih merata.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa untuk memberdayakan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan adalah menekan perasaan ketidakberdayaan, memutuskan hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap lapisan orang miskin, menanamkan perasaan sama, melibatkan masyarakat secara penuh dalam merealisasikan perumusan pembangunan, membangun kondisi social dan budaya pada masyarakat miskin dan mendistribusikan insfrastruktur yang lebih merata.

2.2.3.4 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Guimares (2004 : 45) yang dikutip Mashoed dalam “ Integrated Rural Development” menyatakan beberapa strategi pemberdayaan yang dapat dilakukan secara simultan :

1. Strategi De – Linking

Strategi ini meletakkan sasaran penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan kemampuan kaum miskin untuk mengartikulasi kepentingan kepada sistem sehingga diharapkan adanya keberlanjutan program pengentasan kemiskinan.

2. Strategi Desentralisasi

Strategi ini menempatkan lokus pengambilan keputusan pada unit paling dekat dengan kelompok sasaran, sehingga dapat terwujud keputusan yang paling merefleksikan aspirasi dan kepentingan objektif masyarakat miskin. Maka upaya yang dilakukan melalui pendekatan pelayanan dan berada pada lingkungan masyarakat miskin.

3. Strategi Integrasi Spatial

Dengan strategi ini, pengentasan kemiskinan dilakukan melalui perencanaan yang terintegrasi, yaitu antara desa tertinggal dengan kota terdekat, antara desa terisolasi dengan kota kecamatan, dan seterusnya.

2.2.3.5 Upaya-upaya Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat martabat lapisan masyarakat, yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan dirinya dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut Kartasmita dalam Mashoed (2004:46), upaya – upaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga tahap, antara lain :

1. Menciptakan suasana atau iklim tolaknya yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang. Disini titik tolaknya bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat

dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.

2. Memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat (Empowering). Dalam rangka ini perlu langkah-langkah yang lebih positif, Selain menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini merupakan / meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

3. Pemberdayaan mengandung pula arti melindungi (Protecting)
 Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakkan kepada yang lemah sangat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal ini justru akan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat dari sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan

adalah masyarakat tidak dijadikan objek berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek upaya pembangunan sendiri.

2.2.4 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.2.4.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistik di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;

2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

2.2.4.2 Tujuan Pendirian BUMDes

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Meningkatkan pendapatan asli desa;
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi,

akuntabel, dan sustainable.. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah:

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
2. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
3. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;

4. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
4. Industri dan kerajinan rakyat.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) setelah memperhatikan peraturan di atasnya. Melalui mekanisme “self help” dan “member-base”, maka BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model

usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (one for all).

2.2.4.3 Landasan Hukum BUMDes

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah:

1. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”
2. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:

Pasal 78

 1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
 2. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 3. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 79

1. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
2. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah Desa;
 - b) Tabungan masyarakat;
 - c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
 - d) Pinjaman; dan/atau
 - e) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
3. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80

1. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Bentuk badan hukum;
 - b. Kepengurusan;
 - c. Hak dan kewajiban;
 - d. Permodalan;
 - e. Bagi hasil usaha atau keuntungan;
 - f. Kerjasama dengan pihak ketiga;
 - g. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban

2.2.4.4 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

4. **Transparan.** Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. **Akuntabel.** Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6. **Sustainabel.** Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (kooperatif), membangun kebersamaan/ menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

2.2.5 Kesejahteraan Masyarakat

2.2.5.1 Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan (welfare) ialah kata benda yang dapat diartikan nasib yang baik, kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana

seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.

Menurut HAM, definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk pada keadaan yang baik, kondisi masyarakat di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai.

2.2.5.2 Perkembangan Pengukuran Tingkat Kesejahteraan

Selama beberapa tahun setelah Perang Dunia II, pengukuran tingkat kesejahteraan manusia mengalami perubahan. Pada 1950-an, sejahtera diukur dari aspek fisik, seperti gizi, tinggi dan berat badan, harapan hidup, serta income. Pada 1980-an, ada perubahan di mana sejahtera diukur dari income, tenaga kerja, dan hak-hak sipil. Pada 1990-an, Mahbub Ul-Haq, sarjana keturunan Pakistan, merumuskan ukuran kesejahteraan dengan yang disebut Human Development Index (HDI). Dengan HDI, kesejahteraan tidak lagi ditekankan pada aspek kualitas ekonomi-material saja, tetapi juga pada aspek kualitas sosial suatu

masyarakat. Dalam HDI, indikator kesejahteraan suatu bangsa dapat dilihat dari tiga aspek yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

2.2.5.3 Kriteria Kesejahteraan

Kriteria kesejahteraan sangat beragam, karena kesejahteraan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang sebagai berikut :

1. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat ialah kesejahteraan dalam konteks bermasyarakat, kesejahteraan diartikan sebagai bantuan keuangan atau lainnya kepada individu atau keluarga dari organisasi swasta dan negara atau pemerintah dikarenakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam masyarakat yang beradab, negara tidak boleh membiarkan satu orang pun berada dalam posisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pengelola negara harus berupaya secara terencana untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat adalah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri, tidak dalam keadaan miskin.

2. Kesejahteraan individu

Setiap individu dapat memandang suatu kesejahteraan itu sendiri dengan berbeda, bisa dengan terpenuhi semua kebutuhan secara materi, dan bisa saja sejahtera dengan kebutuhan rohaninya terpenuhi.

Kesejahteraan tergantung pada pandangan orang itu sendiri, hanya saja secara nasional indikatornya dapat ditentukan dalam indikator kemiskinan karena pada dasarnya permasalahan kesejahteraan ini adalah kemiskinan.

3. Kesejahteraan Sosial

Perserikatan bangsa-bangsa telah lama mengatur masalah kesejahteraan social. PBB memberi batasan kesejahteraan social sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Di Indonesia, konsep kesejahteraan social termaktub dalam Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1974 yang memberi definisi “kesejahteraan sosial sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan social, material maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan social yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”.

Adapun beberapa pengertian dari para ahli mengenai kesejahteraan social adalah sebagai berikut:

1. Gertrude Wilson: “Kesejahteraan sosial merupakan perhatian yang terorganisir dari semua orang untuk semua orang”.

2. Walter Friedlander : “Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik”.
3. Elizabeth Wickenden : “kesejahteraan sosial termasuk di dalamnya peraturan perundangan, program, tunjangan dan pelayanan yang menjamin atau memperkuat pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang mendasar dari masyarakat serta menjaga ketentraman dalam masyarakat”.
4. Pre-conference working committee for the XVth International Conference of Social Welfare : “Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Di dalamnya tercakup kebijakan dan pelayanan yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan pendidikan, rekreasi, tradisi budaya, dan lain sebagainya”.

Definisi-definisi di atas mengandung pengertian bahwa kesejahteraan sosial mencakup berbagai usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, baik itu di bidang fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi, dan spiritual. Selain itu kesejahteraan sosial dianalogikan sebagai kesehatan jiwa yang dapat dilihat dari empat sudut pandang yaitu sebagai keadaan, ilmu, kegiatan, dan gerakan. Dalam

kaitannya kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu, ilmu kesejahteraan sosial diartikan sebagai suatu ilmu yang berusaha mengembangkan metodologi (termasuk aspek strategi dan teknik) untuk menangani berbagai macam masalah sosial, baik di tingkat individu, kelompok, keluarga, maupun masyarakat (baik lokal, regional maupun internasional).

2.2.5.4 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan dari kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan keseimbangan sosial baik secara rohaniyah maupun jasmaniah. Peningkatan kondisi kehidupan tersebut ditempuh dengan jalan menumbuhkan, membina, dan mengembangkan keselarasan hidup pribadi-pribadi manusia serta menciptakan lingkungan yang lebih baik meliputi segi fisik, mental, dan sosial budaya.

Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dalam kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan searah, saling menunjang, saling melengkapi, dan saling menopang dengan pembangunan bidang-bidang lainnya dalam upaya yang mengarah kepada semakin meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat secara lebih adil, merata, dan berkualitas.

2.2.5.5 Pendekatan Kesejahteraan

1. Liberalisme

Tiga intervensi negara yang diperlukan dalam pembangunan mencakup:

1. penciptaan distribusi pendapatan

2. stabilisasi mekanisme pasar swasta
3. penyediaan barang-barang publik (public goods) yang tidak mampu.

Kesejahteraan sosial berporos pada paradigma institusional universal yang meyakini bahwa masalah sosial hanya bisa dipecahkan dengan program pelayanan sosial yang melembaga, berkelanjutan, dan mencakup semua warga. Pendekatan pekerjaan sosial menekankan pentingnya aspek pencegahan dan pengembangan kesempatan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

2. Konservatisme

Mazhab konservatisme adalah penentang welfare state. Sistem politik pada hakekatnya bersifat fungsional dan karenanya akan lebih baik jika dibiarkan berjalan sendiri. Masalah sosial terjadi bukan karena kesalahan sistem, melainkan kesalahan individu yang bersangkutan. Misalnya, karena malas, tidak memiliki jiwa wirausaha, dan karakteristik budaya kemiskinan lainnya. Pelayanan sosial hanya perlu diberikan kepada kelompok lemah secara temporer manakala lembaga pasar dan keluarga tidak berfungsi. Pendekatan pekerjaan sosial lebih menitikberatkan pada pelayanan langsung dan rehabilitasi sosial-klinis untuk membantu orang agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.

3. Strukturalisme

Kaum struktural memandang masalah sosial sebagai akibat adanya ketimpangan pada sistem atau struktur sosial masyarakat. Masalah sosial

adalah situasi tidak terhindarkan dan akan selalu ada dalam sistem yang classist, sexist dan racist, karena sistem seperti itu menciptakan ketidakadilan melalui perbedaan-perbedaan status sosial. Keadaan ini akan semakin membesar dan memburuk dalam sebuah sistem ekonomi kapitalis. Rakyat adalah korban dan objek eksploitasi orang-orang yang memiliki kekuasaan dan privilege. Solusinya: rakyat harus berjuang memperoleh kekuasaan dan menjangka sumber-sumber. Sistem ekonomi, sosial dan politik harus diubah dan direstrukturisasi secara menyeluruh.

2.2.5.6 Indikator Kesejahteraan

Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut berbagai bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup, diantaranya:

1. kependudukan,
2. kesehatan dan gizi,
3. pendidikan,
4. ketenagakerjaan,
5. taraf dan pola konsumsi,
6. perumahan, serta sosial lainnya.

Keenam aspek tersebut dapat diketahui dengan berbagai indikator-indikator kesejahteraan yang diantaranya :

2.2.6 Simpan Pinjam

2.2.6.1 Pengertian Simpan Pinjam

Menurut Melayu SP Hasibuan (1996) , Simpan Pinjam merupakan suatu transaksi yang memungut dana dalam bentuk pinjaman dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi gerakan rentenir yang merugikan masyarakat. Jadi Simpan Pinjam merupakan suatu usaha yang memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyimpan dan meminjam uang.

Menurut Ninik Widiyanti (2003), Simpan Pinjam merupakan suatu usaha yang melakukan pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat, tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Menurut Umar Burhan (1989), Simpan Pinjam adalah suatu usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota dalam jumlah dan waktu tertentu sesuai dengan bunga yang telah disepakati.

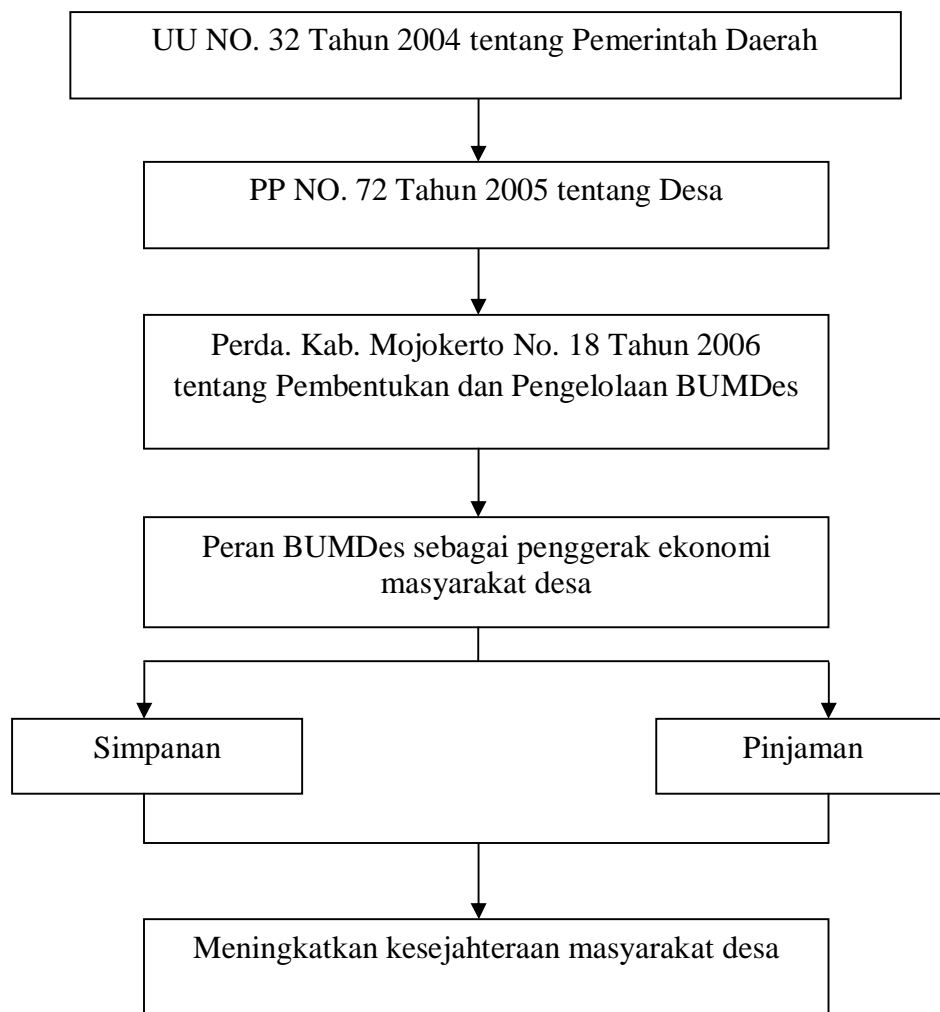
Usaha simpan pinjam merupakan salah satu usaha yang telah berakar dan dikenal secara luas oleh anggota koperasi dan masyarakat di Indonesia. Usaha ini adalah salah satu usaha lembaga keuangan non bank dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya. Pada umumnya

usaha simpan pinjam di Indonesia tumbuh karena sulit mendapatkan bantuan permodalan melalui sistem pemberian perkreditan kredit dari perbankan.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan alur peneliti dalam memberikan penjelasan kepada orang lain. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir



Sumber : data yang diolah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yang mencoba menggambarkan secara mendalam suatu obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan maksud ingin memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Secara teoritis, menurut Bagdan dan Taylor dalam Moleong (2004:4), penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Prosedur penelitian ini diarahkan pada situasi dan individu secara utuh sebagai obyek penelitian sebagaimana dinyatakan Moleong (2004:4) bahwa pendekatan kualitatif diarahkan pada situasi dan individu tersebut secara holistic (utuh) dalam hal peneliti tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai suatu keutuhan.

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller mengungkapkan, bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia

baik dalam kawasannya maupun peristilahannya. Sehingga dalam penelitian ini, penulis berusaha menggambarkan dan ingin mengetahui tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Pandankrajan kecamatan Kemlagi kabupaten Mojokerto.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2004:97), fokus penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan batas yang harus dilalui oleh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya.

Adapun aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat desa dengan sasaran yaitu:

1. Simpanan

BUMDes menerima simpanan dari anggota dan masyarakat dengan imbalan bunga / jasa yang dapat diambil sewaktu-waktu. Selain itu BUMDes juga menerima simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela anggota. Simpanan ini merupakan salah satu sumber modal dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes.

2. Pinjaman

Pinjaman hanya dapat diberikan untuk kegiatan ekonomi produktif dengan menekankan akses kelayakan usaha serta memperhatikan kemampuan,

keinginan dan kesungguhan calon peminjam. Pinjaman dapat diberikan kepada anggota BUMDes dan masyarakat yang mempunyai usaha di Desa atau tergabung dalam kelompok usaha bersama. Pinjaman yang diberikan kepada peminjam disesuaikan dengan kemampuan dana BUMDes yang tersedia.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti guna memperoleh data yang akurat. Agar memperoleh data yang akurat atau mendekati kebenaran sesuai dengan fokus penelitian, maka penulis memilih dan menetapkan lokasi penelitian ini di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

Pemilihan lokasi penelitian ini ditentukan secara “purposive”, yaitu didasarkan pada pertimbangan bahwa di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto merupakan daerah yang telah melaksanakan pemberdayaan melalui peranan BUMDes. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk meneliti peran BUMDes dalam pemberdayaan yang khususnya Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

3.4 Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2004:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah berasal dari informan yang berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Informan Kunci (Key Person)

Informan kunci, dimana pemilihannya secara purposive sampling dan diseleksi melalui teknik snowball sampling yang didasarkan atas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data yang benar-benar relevan dan kompeten. Sebagai informan awal adalah Ibu jami selaku sekretaris BUMDes yang menangani penerimaan peneliti di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Sedangkan informan selanjutnya diminta kepada informan awal untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi, maka untuk triangulasi data tersebut informan tersebut ditemukan dengan cara snow ball. secara rinci adalah sebagai berikut: peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat Desa, dengan sasaran kajian pada sebagai key person adalah Bapak rofian selaku ketua BUMDes Sebagai informan, Serta Masyarakat yang menjadi anggota BUMDes.

2. Tempat dan Peristiwa

Tempat dan peristiwa dimana fenomena yang terjadi atau yang pernah terjadi berkaitan dengan fokus penelitian yaitu di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

3. Dokumen

Dokumen sebagai sumber data yang sifatnya melengkapi data utama yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian antara lain meliputi : buku pedoman tentang BUMDes, buku tentang teori kemakmuran, kamus besar

bahasa indonesia, buku aset untuk orang miskin, data-data kependudukan, data jumlah penduduk miskin, dan data anggota BUMDes.

3.5 Pengumpulan Data

Data merupakan bagian terpenting dalam penelitian karena hakekat dari penelitian adalah pencarian data yang nantinya dianalisa dan diinterpretasikan. Dalam penelitian kualitatif, sumber data yang utama adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen.

Dalam rangkaian pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tiga proses kegiatan yang dilakukan, yaitu :

1. Proses memasuki lokasi penelitian (Getting In)

Agar proses pengumpulan data dari informasi berjalan baik, peneliti terlebih dahulu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, baik kelengkapan administrative maupun semua persoalan yang berhubungan dengan setting dan subyek penelitian dan mencari relasi awal. Dalam memasuki lokasi penelitian, peneliti menempuh pendekatan formal dan informal serta menjalin hubungan baik dengan informan (Moleong, 2004:128). Maka dalam tahap ini peneliti memasuki lokasi penelitian guna memperoleh gambaran aktifitasnya dengan membawa surat ijin penelitian Universitas Pembangunan Nasional. Selanjutnya peneliti melakukan diskusi dengan informan guna menggali informasi yang selanjutnya diolah sebagai data penunjang dari penelitian ini.

2. Ketika Berada di Lokasi Penelitian (Getting Along)

Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara awal maupun observasi untuk mencari informasi yang lengkap dan tepat serta menangkap makna intisari dari informasi dan fenomena yang diperoleh tentang peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat Desa.

3. Teknik Pengumpulan Data (Logging The Data)

Setelah kedua langkah diatas maka peneliti melakukan pengumpulan data, dimana teknik yang digunakan adalah :

a. Wawancara mendalam (Indepth Interview)

Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi tentang program simpan pinjam yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dengan informan mengenai peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat Desa..

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan tentang peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat Desa.

c. Pengamatan (Observation)

Teknik ini dilakukan untuk mengungkap dan memperoleh deskripsi secara utuh dengan pengamatan langsung dengan masyarakat.

3.6 Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1992:16), teknik analisa data kualitatif meliputi tiga alur kegiatan sebagai sesuatu yang terjalin pada saat sebelum,

selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun suatu analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa dengan menggunakan model interaktif (interactive models of analysis) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992:16). Dalam model ini terdapat 4 komponen analisis, yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu data yang dikumpulkan berupa wujud kata-kata bukan rangkaian kata. Dan itu mungkin telah dikumpulkan dengan angka macam cara (observasi, wawancara, dokumen, pita rekaman). Dan yang biasanya “di proses” kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan atau alas tulis).

2. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, perumusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan informasi data kasar yang muncul dan catatan tulisan lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian Data

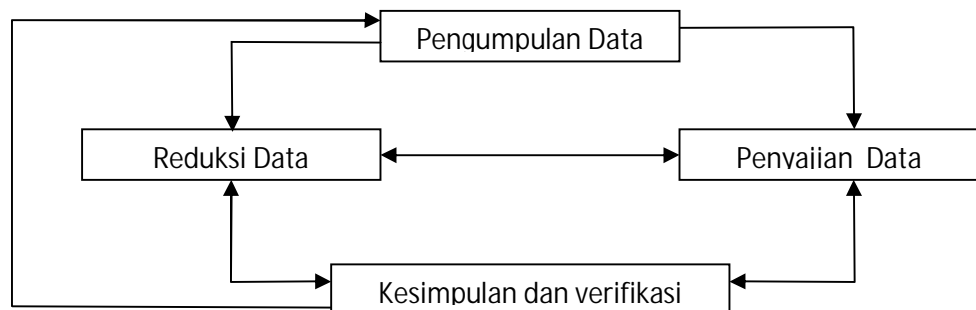
Sekumpulan informasi yang disusun secara terpadu dan mullah dipahami yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan.

4. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Peneliti berusaha untuk menganalisa dan mencari pola, terra, hubungan, persamaan dan hal-hal yang wring timbul yang dituangkan ke dalam kesimpulan (1992:15).

Proses analisis data secara interaktif dapat disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut :

Gambar 3.1 Analisis Model Interaktif Menurut Miles dan Huberman



Sumber : Miles dan Huberman dalam terjemahan Tjetjep rohendi rohidi (1992:20)

3.7 Keabsahan Data

Dalam setiap penelitian memerlukan standar untuk melihat derajat kepercayaannya atau kebenarannya dari hasil penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif, standar tersebut disebut dengan keabsahan data. Menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2004:324). Untuk menetapkan keabsahan data maka diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas empat kriteria yang digunakan yaitu :

1. Derajat Kepercayaan (Credibility)

Pada dasarnya penerapan kriteria derajat kepercayaan menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melakukan inkuiri (penyelidikan) sedemikian rupa, sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai serta untuk menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Keteralihan (Transferability)

Keteralihan sebagai persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya, jika ia ingin membuat penelitian kecil untuk memastikan usaha memverifikasi tersebut.

3. Kebergantungan (Dependability)

Merupakan substitusi istilah rehabilitas dalam penelitian non kualitatif. Yaitu dengan diadakan pengulangan studi dalam suatu kondisi yang sama hasilnya secara esensial sama maka berarti reabilitasnya tinggi. Peneliti sebagai instrument penelitian bisa saja membuat kesalahan karena keterbatasan yang dimiliki atau bisa juga karena keletihan, untuk itu digunakan kriteria ini dimana konsepnya lebih luas daripada rehabilitas. Hal tersebut disebabkan oleh peninjauannya dari segi bahwa konsep itu memperhitungkan segala-galanya, yaitu yang ada pada rehabilitas itu

sendiri ditambah faktor-faktor lainnya yang tersangkut. Hal tersebut akan dibahas dalam konteks pemeriksaan.

4. Kepastian (Conformability)

Kepastian di sini adalah bahwa sesuatu itu obyektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Sesuatu yang obyektif berarti dapat dipercaya, faktual dan dapat dipastikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Berdirinya BUMDes Desa Pandankrajan

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU 22/1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian

badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah.

Ketika gagasan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Mojokerto yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), banyak pihak yang merasa pesimis. Pihak yang pesimis ini berasumsi bahwa jangankan mengembangkan Bumdes, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banyak yang bermasalah. Apalagi Badan Usaha Milik Desa? Tentu saja pemikiran demikian mengandung kebenaran mengingat masih banyak badan usaha pemerintah di aras desa yang bermasalah sehingga pengembangan Bumdes juga kelak akan mengalami permasalahan yang sama. Namun satu hal dilupakan bahwa asumsi demikian belum tentu benar, toh permasalahan desa dan di atas desa sangat berbeda.

Sebagai langkah awal dalam pembentukan BUMDes di desa-desa yang ada di Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto melakukan sosialisasi ke beberapa kecamatan agar disampaikan ke desa tentang pentingnya pendirian BUMDes untuk meningkatkan

pendapatan asli desa dan dapat memberdayakan masyarakat. Salah satu kecamatan yang mendapatkan sosialisasi tentang pendirian BUMDes adalah Kecamatan Kemlagi. Pemerintah Kecamatan Kemlagi memberikan amanat kepada Pemerintah Desa Pandankrajan untuk mengikuti sosialisasi tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

Pemerintah Kecamatan Kemlagi memberikan amanatnya kepada Pemerintah Desa Pandankrajan harapannya agar Desa Pandankrajan mampu mendirikan dan mengelola BUMDes, dimana Desa Pandankrajan akan dijadikan sebagai percontohan desa yang mampu mendirikan dan mengelola BUMDes di wilayah Kecamatan Kemlagi.

Pendirian BUMDes di Desa Pandankrajan didasarkan pada Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Desember 2005 Nomor : 141 / 13137 / 011 / 2005 tentang pengembangan BUMDes, serta adanya Surat Bupati Mojokerto Tanggal 2 Pebruari 2006 Nomor 4126 / 270 / 416 / 204 / 2006 tentang Penunjukan dan Pembentukan BUMDes Percontohan Tahun 2006.

Dalam rangka memberdayakan usaha perekonomian rakyat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan perlu dibentuk BUMDes. Dengan demikian Kepala Desa Pandankrajan membuat kebijakan Keputusan Kepala Desa Pandankrajan Tentang Penetapan Pengurus / Pengelola (BUMDes) Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Setelah kepala desa membuat kebijakan tersebut pemerintah desa mengadakan musyawarah desa dengan tokoh masyarakat beserta perwakilan dari masyarakat untuk merumuskan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BUMDes.

Sesuai dengan keputusan Kepala Desa Pandankrajan BUMDes Desa Pandankrajan bernama “BUMDes Pandan Arum” yang bergerak dibidang simpan pinjam. Dengan demikian BUMDes Desa Pandankrajan berdiri pada tanggal 3 Pebruari 2006. Masyarakat Desa Pandankrajan berharap berdirinya BUMDes mampu mengatasi perekonomian masyarakat dan mensejahterakan masyarakat yang berdomisili di Desa Pandankrajan.

Gambar 4.1
Kantor BUMDes Pandan Arum Desa Pandankrajan



Sumber : kantor BUMDes Desa Pandankrajan 2012

4.1.2 Tujuan BUMDes Desa Pandankrajan

BUMDes Desa Pandankrajan bertujuan untuk melayani anggota masyarakat yang berdomosili di Desa Pandankrajan. Dan bergerak dalam Usaha Ekonomi Desa bidang perekonomian rakyat (Usaha Kecil).

4.1.3 Kegiatan BUMDes Desa Pandankrajan

Kegiatan BUMDes Desa Pandankrajan antara lain ;

1. Menerima simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela anggota
2. Memberikan pinjaman kepada kelompok peserta yang membutuhkan modal usaha
3. Menerima pinjaman dari lembaga – lembaga / kelompok masyarakat

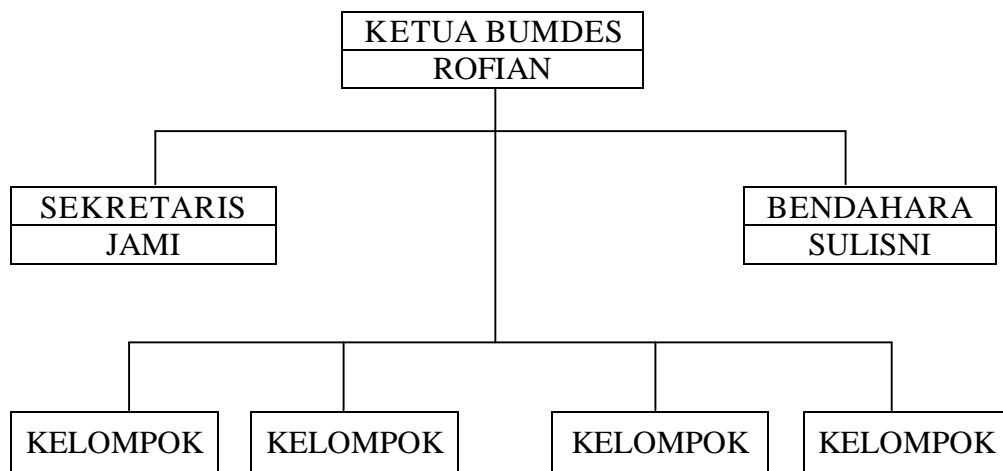
4.1.4 Persyaratan Menjadi Anggota BUMDes Desa Pandankrajan

Syarat untuk menjadi anggota BUMDes Desa Pandankrajan adalah sebagai berikut ;

1. Pengusaha kecil Desa/Kelurahan Pandankrajan yang telah terdaftar pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
2. Mempunyai anggota yang benar – benar mempunyai kegiatan usaha yang layak
3. Diterima sebagai anggota kelompok
4. Membayar simpanan pokok yang telah ditetapkan sebesar Rp 10.000,-
5. Bersedia mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku pada BUMDes Desa/Kelurahan Pandankrajan

4.1.5 Stuktur Oraganisasi BUMDes Desa Pandankrajan

Gambar 4.2
Struktur Oraganisasi
BUMDes Desa Pandankrajan



Sumber : Kantor BUMDes Pandan Arum Desa Pandankrajan 2012

4.1.6 Tugas Dan Tanggung Jawab Pengurus BUMDes Desa Pandan Krajan

1. Ketua

- a. Memimpin organisasi BUMDes
- b. Mengevaluasi dan memutuskan besarnya pinjaman yang diajukan kepada BUMDes
- c. Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan pengembalian pinjaman BUMDes
- d. Mengatur perputaran modal BUMDes
- e. Melaporkan posisi keuangan kepada Tim Pembina Tingkat Desa secara Periodik

2. Sekretaris

- a. Mengerjakan Administrasi Organisasi
- b. Memelihara Inventaris BUMDes
- c. Membantu dibidang keuangan

- d. Melakukan penagihan terhadap para nasabah / anggota

3. Bendahara

- a. Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti – bukti penerimaan dan pembayaran yang syah
- b. Melaksanakan pembukuan Administrasi Keuangan
- c. Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua BUMDes secara periodic atau sewaktu – waktu diperlukan

4.1.7 Komposisi Pengelola BUMDes Desa Pandankrajan

Jumlah pengurus BUMDes Desa Pandankrajan sebanyak 3 orang, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Daftar Pengurus BUMDes Desa Pandankrajan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Laki – laki	1
2.	Perempuan	2
Jumlah		3

Sumber : Kantor BUMDes Desa Pandankrajan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengurus BUMDes Desa Pandankrajan terdapat 3 orang. Dimana jumlah laki – laki 1 orang dan perempuan 3 orang.

4.1.8 Komposisi Anggota BUMDes Desa Pandankrajan

Jumlah anggota BUMDes Desa Pandankrajan sebanyak 125 orang, sebagai berikut :

Tabel 4.2
Daftar Anggota BUMDes Desa Pandankrajan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Laki – laki	49
2.	Perempuan	76
Jumlah		125

Sumber : Kantor BUMDes Desa Pandankrajan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa anggota BUMDes Desa Pandankrajan terdapat 125 orang. Dimana jumlah anggota perempuan yang paling banyak yaitu 76 orang sedangkan jumlah anggota laki – laki terdapat 49 orang.

4.2 Hasil Penelitian

Pada bagian hasil, akan diuraikan hasil penelitian berupa temuan-temuan dilapangan berdasarkan pengamatan penulis dilapangan. Untuk memperlancar penelitian tersebut, penulis menggunakan metode wawancara dan didalam proses wawancara tersebut penulis banyak dibantu oleh key person dan informan, sehingga proses pengumpulan data dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan fakta dilapangan dapat diketahui bahwa peran BUMDes dalam memeberdayakan masyarakat Desa Pandankrajan dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat desa yang diamanatkan oleh Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes. Pelaksanaan Perda tersebut merupakan salah satu bentuk upaya dari Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Desa yang berperan langsung dalam hal

pemberdayaan masyarakat desa. Serta upaya dari Ketua BUMDes sebagai penanggung jawab pengelolaan BUMDes yang berperan langsung dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam.

Data dilampirkan mengenai Laporan kegiatan BUMDes Desa Pandankrajan sampai dengan bulan November adalah sebagai berikut:

1. Permodalan

- a. Dana dari Pemerintah Kabupaten : Rp 25.000.000 (1 kali)
- b. Modal Cadangan : Rp 22.766.619
- c. Simpanan Anggota
 - Simpanan Pokok : Rp 1.250.000 (125 orang)
 - Simpanan Wajib Pinjam : Rp 18.281.000 (125 orang)
 - Simpanan Sukarela : Rp 4.500.000 (1 orang)
- d. Dana Pendidikan : Rp 2.581.994
- e. SHU belum dibagi : Rp -
- f. SHU berjalan : Rp 28.760.210
- g. Modal lain dari dana ADD : Rp 2.200.000

2. Usaha

- a. Sisa pinjaman tahun lalu : Rp 69.446.106 (84 orang)
- b. Realisasi pinjaman th ini s/d Bln ini : Rp 144.000.000 (88 orang)
- c. Angsuran Pokok Pinjaman : Rp 129.156.050 (104 orang)
- d. Sisa Pinjaman : Rp 84.290.056 (107 orang)
- e. Pendapatan : Rp 32.468.000
- f. Biaya : Rp 3.707.790
- g. SHU : Rp 28.760.210

h. Total Aset	: Rp 105.349.823
i. Sisa Kas	: Rp 21.059.767
- Pinjaman Lancar	: Rp 84.290.056 (107 orang)
- Pinjaman Macet	: Rp -

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah modal BUMDes Desa Pandankrajan adalah Rp 105.339.823. Jumlah simpanan anggota BUMDes yaitu Rp 24.031.000. Pemberian pinjaman kepada anggota yang terealisasi sampai dengan bulan November tahun 2012 yaitu Rp 144.000.000.

Sesuai dengan fokus penelitian yang ada, maka penelitian ini akan mendeskripsikan serta menguraikan hasil dari temuan-temuan lapangan secara beruntut dan tereduksi sesuai fokus dan sasaran kajian penelitian.

4.2.1 Simpanan

BUMDes menerima simpanan dari anggota dan masyarakat dengan imbalan bunga / jasa yang dapat diambil sewaktu-waktu. Selain itu BUMDes juga menerima simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela anggota. Simpanan ini merupakan salah satu sumber modal dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes.

1. Simpanan Pokok Anggota.

Dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandankrajan pasal 7 ayat 1a, dijelaskan bahwa simpanan pokok anggota adalah simpanan yang harus dibayar oleh setiap anggota sebesar Rp 10.000,-. Simpanan pokok dapat dibayar secara tunai atau angsuran atau angsuran paling 2 kali sebulan sejak permohonan menjadi anggota.

Sesuai dengan fokus maka peneliti ingin mengetahui peran pengelola BUMDes agar masyarakat melakukan simpanan pokok, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rofian Selaku Ketua BUMDes Desa Pandankrajan. Berikut hasil wawancaranya :

“warga yang mendaftar menjadi anggota, kami dikenakan biaya Rp 10.000,- untuk simpanan pokok. untuk meringankan warga ,pembayarannya bisa diangsur 2 kali dalam satu bulan....”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Jami selaku sekretaris BUMDes Desa Pandankrajan, mengatakan bahwa :

“....bagi calon anggota wajib membayar simpanan pokok Rp 10.000,- dimana pembayarannya bisa diangsur 2 kali sebulan”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal tersebut dipertegas oleh Ibu Sulisni selaku bendahara BUMDes Desa Pandankrajan, mengatakan bahwa :

“....masyarakat yang mendaftar anggota bumdes wajib membayar simpanan pokok Rp 10.000,-. Jika ada calon anggota yang tidak membawa uang saat mendaftar ,kami memberi keringan pembayarannya bisa diangsur 2 kali dalam satu bulan”
(Wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan anggota BUMDes Desa Pandankrajan yaitu Bapak Hari Sukar, mengatakan bahwa :

“....cuma Rp 10.000,- saja mas, jadi ya saya bayar langsung saja”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Sedangkan Bapak Paiso yang mendaftar anggota BUMDes Desa Pandankrajan, mengatakan bahwa :

“ya Rp 10.000,-. tapi mbayarnya saya angsur mas, soalnya saya cuma bawa uang Rp 5.000,-.....”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Untuk mengetahui tujuan pembayaran simpanan pokok, maka peneliti melakukan wawancara dengan pengurus dan anggota BUMDes. Berikut hasil wawancara dengan Rofian Selaku Ketua BUMDes Desa Pandankrajan :

”untuk tambahan modal pengelolaan keuangan bumdes dan nantinya juga demi kesejahteraan masyarakat dengan memberi bantuan pinjaman modal usaha warga desa sini”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal ini juga dipertegas dengan hasil wawancara Ibu Jami Selaku Sekretaris BUMDes, mengatakan bahwa :

“untuk modal bumdes, agar kegiatan bumdes dalam memberdayakan masyarakat melalui bantuan pinjaman modal usaha masyarakat dapat berjalan lancar”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Sulisni selaku Bendahara BUMDes Desa Pandankrajan, mengatakan bahwa :

”untuk modal penegelolaan bumdes agar kegiatan bumdes dapat berjalan dengan lancar dalam memberikan bantuan pinjaman kepada masyarakat”
(Wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan anggota BUMDes Desa Pandankrajan yaitu Bapak Hari Sukar, mengatakan bahwa :

“kata pengurus itu untuk modal usaha bumdes yang memutarakan dana untuk memberi pinjaman pada masyarakat”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Sedangkan Bapak Paise yang mendaftar anggota BUMDes Desa Pandankrajan, mengatakan bahwa :

“nggak tau mas, yang saya tau untuk syarat daftar anggota bumdes”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengurus

BUMDes mewajibkan bagi setiap calon anggota BUMDes desa Pandankrajan untuk membayar Rp 10.000,- dan dapat diangsur 2 kali, dimana simpanan tersebut untuk tambahan modal pengelolaan kegiatan BUMDes. Dalam hal ini pengurus BUMDes telah mengimplementasikan simpanan pokok anggota yang ditetapkan dalam AD/ART BUMDes Desa Pandankrajan pasal 7 ayat 1.

2. Simpanan Wajib Pinjam

Dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandankrajan pasal 7 ayat 1b, Setiap peminjam pada BUMDes wajib menyetor simpanan wajib pinjam. Besarnya simpanan wajib pinjam ditetapkan minimal 3% (tiga persen) dari pokok pinjaman.

Sesuai dengan fokus maka peneliti ingin mengetahui peran pengelola BUMDes agar masyarakat melakukan simpanan wajib pinjam, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rofian Selaku Ketua BUMDes Desa Pandankrajan. Berikut hasil wawancaranya :

“pokoknya masyarakat yang pinjam di sini harus membayar simpanan wajib untuk tambahan modal BUMDes, terserah mereka mau nyetor berapa, kami mematok minimal 3% dari besarnya pinjaman yang diajukan ”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal senada diungkapkan oleh Ibu Sulisni selaku Bendahara BUMDes Desa Pandankrajan, mengatakan bahwa :

“kami mewajibkan anggota yang pinjam wajib menyetor paling 3% dari pokok pinjamanya”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal tersebut dipertegas oleh Ibu Jami selaku Sekretaris BUMDes Desa Pandankrajan, mengatakan bahwa :

“setiap masyarakat yang meminjam wajib menyetor 3% dari pinjaman pokok. Ini untuk modal bumdes yang kami putarkan kembali untuk memberi pinjaman pada masyarakat dan nanti kami akan membagi SHU pada akhir tahun”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Munib selaku anggota BUMDes Desa Pandankrajan, mengatakan bahwa :

“ya sesuai dengan batas yang ditetapkan bumdes 3%”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara Bapak Paise selaku anggota BUMDes Desa Pandankrajan, mengatakan bahwa :

“3% saja mas, gak usah banyak-banyak”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Dengan ditetapkannya setoran untuk simpanan wajib pinjam minimal 3%, apakah masyarakat yang pinjam di BUMDes merasa keberatan. Maka peneliti melakukan wawancara dengan peminjam BUMDes Desa Pandankrajan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Munib:

“gak apa-apa mas, simpanan ini kan untuk modal bumdes yang dikelola untuk kepentingan bersama”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Hari Sukar, yang mengatakan bahwa:

“nggak ko, ni sudah kesepakatan demi kelancaran usaha bumdes yang melayani masyarakat sini”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Paise, mengatakan bahwa:

“ya nggak apa-apa si, tapi kalau bisa diturunin sedikit jadi 1%”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setiap anggota BUMDes desa Pandankrajan yang mengajukan pinjaman wajib menyetor simpanan wajib pinjam minimal 3% dari pinjaman pokok. Simpanan tersebut digunakan sebagai tambahan modal pengelolaan kegiatan BUMDes. Dalam hal ini pengurus BUMDes telah mengimplementasikan simpanan pokok anggota yang ditetapkan dalam AD/ART BUMDes Desa Pandankrajan pasal 7 ayat 1. Dalam hasil wawancara diatas telah ditemukan adanya masyarakat yang kurang setuju jika harus menyetor 3% sesuai yang ditetapkan dalam AD/ART BUMDes Desa Pandankrajan pasal 7 ayat 1.

3. Simpanan Sukarela

Dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandankrajan pasal 7 ayat 1c, BUMDes menerima simpanan sukarela dari anggota dan masyarakat dengan imbalan bunga / jasa 1% perbulan dari saldo terendah dalam bulan yang bersangkutan dan dapat diambil sewaktu – waktu.

Sesuai dengan fokus maka peneliti ingin menegetahui peran pengelola BUMDes agar masyarakat melakukan simpanan sukarela, maka penilti melakukan wawancara dengan Bapak Rofian Selaku Ketua BUMDes Desa Pandankrajan. Berikut hasil wawancaranya :

“setiap pertemuan dengan anggota bumdes kami menghimbau kepada anggota untuk rajin menabungkan uangnya, kami akan imbalan bunga 1% persen perbulannya”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal tersebut dipertegas oleh Ibu Jami Selaku Sekretaris BUMDes Desa Pandankrajan, mengatakan bahwa :

“kami menginformasikan untuk anggota dan masyarakat bisa menabung di bumdes, kami akan memberikan imbalan bunga 1% perbulannya”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Sulisni selaku Bendahara BUMDes Desa Pandankrajan, mengatakan bahwa :

“saya harap masyarakat sini untuk menabung di bumdes, agar masyarakat tidak boros. Dan kami akan memberi imbalan bunga 1% perbulan”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Untuk mengetahui anggota dan masyarakat yang melakukan simpanan sukarela. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rofian selaku ketua BUMDes Desa Pandankrajan yang melakukan simpanan sukarela. Mengatakan bahwa :

“nggak ada, hanya ada 1 orang yang menabung. Masyarakat berpikir sudah melakukan simpanan uang di bumdes yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib, memang nanti pada akhir tahun kami akan membaginya dalam pembagian SHU”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal senada diungkapkan oleh Ibu Sulisni selaku Bendahara BUMDes Desa Pandankrajan, mengatakan bahwa:

“Cuma ada 1 orang saja yang menyimpan uangnya disini. simpanan sukarela ini kan tidak wajib jadi mereka menganggap sudah melakukan simpanan di BUMDes yaitu simpanan pokok dan simwapin”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Sardan yang melakukan simpanan di BUMDes Desa Pandankrajan, mengatakan bahwa:

“iya mas. saya menyimpan uang di bumdes agar uang saya tidak cepat habis kalau saya simpan dirumah”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Sedangkan Bapak Munib yang tidak melakukan simpanan sukarela di BUMDes, mengatakan bahwa:

“ndak mas. Saya simpan sendiri saja dirumah”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal senada diungkapkan oleh Ibu Jumani, mngatakan bahwa:

“nggak mas, karena uangnya saya buat untuk kebutuhan keluarga”
(wawancara tanggal 3 November 2012)

Sesuai dengan fokus, peneliti juga ingin mengetahui Tujuan BUMDes Desa Pandankrajan menerima simpanan sukarela tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan pengurus dan anggota BUMDes. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rofian selaku ketua BUMDes Desa Pandankrajan :

“sama dengan simpanan pokok dan simpanan wajib yaitu untuk tambahan modal bumdes, modal bumdes disini kan didapat dari bantuan pemerintah dan simpanan anggota”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal tersebut dipertegas oleh Ibu Jami selaku Sekretaris BUMDes Desa Pandankrajan, mengatakan bahwa :

“untuk tambahan modal bumdes, sama saja dengan simpanan pokok dan simpanan wajib pinjam. akan tetapi untuk simpanan sukarela ini kan tabungannya masyarakat jika sewaktu-waktu masyarakat ingin mengambilnya, ya langsung dikasih ditambah dengan bunga 1% perbulan”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

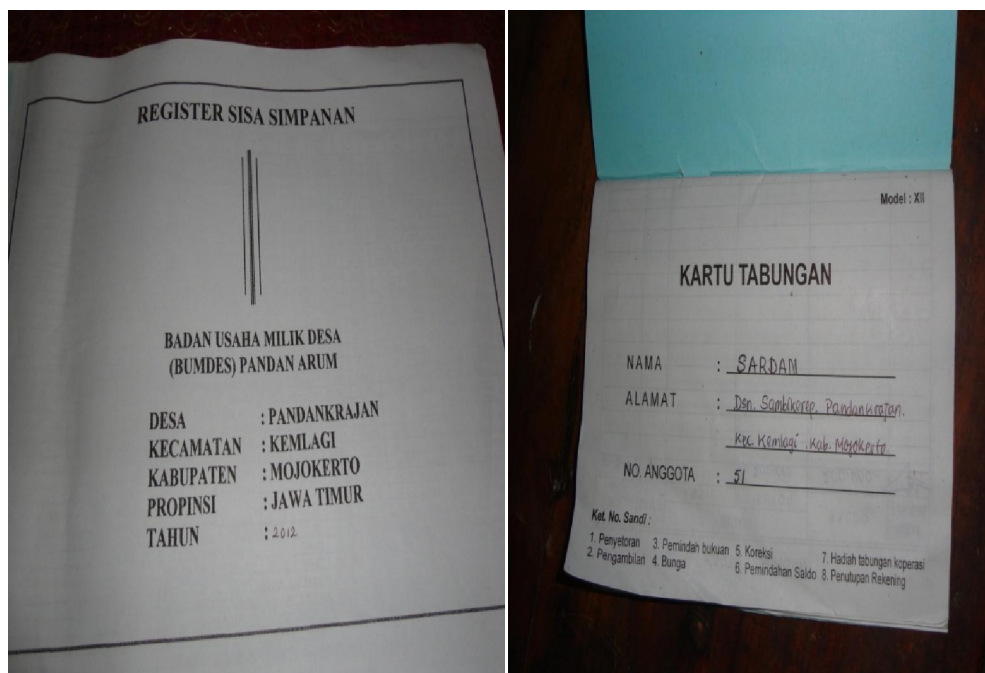
Hal tersebut juga dipertegas oleh Ibu Sulisni selaku Bendahara BUMDes Desa Pandankrajan, mengatakan bahwa :

“ya sama dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, untuk menambah modal bumdes agar lancar dalam mengelola kegiatannya membantu memberdayakan masyarakat dan agar masyarakat rajin menabung”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa simpanan sukarela ini dilakukan oleh BUMDes untuk memudahkan masyarakat yang ingin menabungkan uangnya dan BUMDes akan memberi imbalan bunga 1% per bulanya. Hal ini sesuai dengan AD/ART BUMDes Desa Pandankrajan pasal 7 ayat 1. Dari hasil wawancara bahwa masyarakat yang melakukan simpanan sukarela di BUMDes hanya terdapat 1 orang. Hal ini peran BUMDes untuk mendapatkan tambahan modal dari simpanan sukarela belum sesuai tujuan.

Untuk mendukung data primer (wawancara), peneliti melihat dokumen buku simpanan dan buku tabungan anggota BUMDes Desa Pandankrajan yang dijadikan data sekunder. Berikut gambar untuk memperkuat data primer diatas:

Gambar 4.3
Buku Simpanan dan Kartu Tabungan
BUMDes Desa Pandankrajan



Sumber : Kantor BUMDes Desa Pandankrajan 2012

Dari ketiga simpanan yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa simpanan anggota digunakan sebagai tambahan modal pengelolaan BUMDes dan pada akhir tahun ada pembagian Sisa Hasil Usaha yang dibagikan oleh pengurus BUMDes kepada anggota BUMDes dan untuk Desa.

4.2.2 Pinjaman

Dalam AD/ART BUMDes Desa Pandankrajan pasal 10, dijelaskan bahwa Pinjaman hanya dapat diberikan untuk kegiatan ekonomi produktif dengan menekankan akses kelayakan usaha serta memperhatikan kemampuan, keinginan dan kesungguhan calon peminjam. Pinjaman dapat diberikan kepada anggota BUMDes dan masyarakat yang mempunyai usaha di Desa atau tergabung dalam kelompok usaha bersama. Anggota dapat mengajukan pinjaman maksimal Rp 5.000.000, hal ini dikarenakan pinjaman yang diberikan kepada anggota disesuaikan dengan kemampuan dana BUMDes yang tersedia.

. Sesuai dengan fokus, peneliti ingin mengetahui proses pemberian pinjaman yang dilakukan oleh BUMDes pada masyarakat. Maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rofian Selaku Ketua BUMDes Desa Pandankrajan. Berikut hasil wawancaranya :

“masyarakat dapat menerima pinjaman tiap satu bulan sekali, maksimal tiap bulannya kami batasi 15 orang yang dapat mengajukan pinjaman”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal senada diungkapkan oleh Ibu Jami selaku Sekretaris BUMDes Desa Pandankrajan, mengatakan bahwa :

“kami mempunyai jadwal tanggal 3 tiap bulannya kami memberikan pinjaman pada masyarakat yang mengajukan pinjaman”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal tersebut dipertegas oleh Ibu Sulisni selaku Bendahara BUMDes Desa Pandankrajan, mengatakan bahwa :

“kami membatasi 15 orang yang bisa mengajukan pinjaman pada tiap bulannya”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal tersebut diperkuat oleh Ibu Jumani selaku anggota bumdes yang melakukan pinjaman di BUMDes desa Pandankrajan, mengatakan bahwa :

“kemarin saya mengajukan pinjaman dan sekarang ini saya dapat pinjaman”
(wawancara tanggal 3 November 2012)

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Paise selaku anggota bumdes yang melakukan pinjaman di BUMDes desa Pandankrajan, mengatakan bahwa :

“sudah seminggu yang lalu saya mengajukan pinjaman tapi besok saya bisa menerima pinjaman”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Sesuai dengan fokus, peneliti ingin mengetahui alasan BUMDes memberikan pinjaman hanya membatasi pada 15 orang pada setiap bulannya. Maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rofian selaku Ketua BUMDes Desa Pandankrajan:

“kita sesuaikan dengan modal bumdes yang tersedia dan jumlah anggota bumdes yang sudah terdaftar”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal senada diungkapkan oleh Ibu Sulisni selaku Bendahara BUMDes Desa Pandankrajan, mengatakan bahwa:

“karena modal bumdes yang ada, tiap bulan kami hanya bias memberi maksimal pada 15 orang tiap bulan”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal tersebut dipertegas oleh Ibu Jami selaku sekretaris BUMDes Desa Pandankrajan, mengatakan bahwa :

“kami sesuaikan dengan modal yang ada di bumdes dan agar lancar memberikan pinjaman pada anggota yang lain, karena tiap bulan selalu ada yang mengajukan pinjaman”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes memberikan pinjaman pada masyarakat setiap satu bulan sekali dengan memberi batasan pada 15 orang yang dapat mengajukan pinjaman, hal tersebut dilakukan karena memperhatikan dana BUMDes yang tersedia, sesuai dengan AD/ART BUMDes Desa Pandankrajan pasal 10 ayat 1.

Sesuai dengan fokus, peneliti ingin mengetahui pelaksanaan pembayaran pinjaman. Maka peneliti melakukan wawancara dengan pengurus BUMDes Desa Pandankrajan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rofian selaku Ketua BUMDes Desa Pandankrajan :

“pembayarannya diangsur setiap satu bulan sekali yang ditetapkan pada tanggal 2 dengan bunga pembayaran pinjaman 2% perbulan”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Jami selaku Sekretaris BUMDes Desa Pandankrajan, menyatakan bahwa :

“besarnya bunga angsuran pembayaran pinjaman yaitu 2% perbulannya, bayarnya setiap satu bulan sekali pada tanggal 2 tiap bulan”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal tersebut diperkuat oleh Ibu Ponira, mengatakan bahwa :

“setiap satu bulan sekali, saya mengangsur pembayaran pinjaman dengan bunga 2% perbulannya”
(wawancara 3 November 2012)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Jumani, mengatakan bahwa :

“saya membayar pinjaman bumdes tiap satu bulan sekali yang ditetapkan oleh bumdes pada tanggal 3 tiap bulannya”
(wawancara tanggal 3 November)

Jika dalam angsuran pembayaran pinjaman terdapat anggota atau peminjam yang menunggak, bagaimana sikap pengurus BUMDes untuk menyikapi masalah tersebut. Maka peneliti melakukan wawancara dengan pengurus BUMDes. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rofian selaku ketua BUMDes Desa Pandankrajan :

“kami akan mengingatkan orang tersebut dan kami tidak akan memberi pinjaman baru pada orang yang belum melunasi pinjamannya. Kami tidak pernah mengambil barang jaminan dari pinjaman yang nunggak, yang kami inginkan angsurannya lancar karena akan kami putarkan kembali untuk memberi pinjaman pada masyarakat”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal tersebut senada dengan Ibu Sulisni selaku Bendahara BUMDes Desa Pandankrajan, mengatakan bahwa :

“jika ada orang yang menunggak, kami tidak akan memberi pinjaman baru pada orang tersebut sebelum pinjamannya dilunasi dan kami akan menegurnya”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal tersebut dipertegas oleh Ibu Jami selaku sekretaris BUMDes Desa Pandankrajan, bahwa :

“kami akan menegur orang itu jika angsurannya melebihi batas yang sudah ditentukan. kami nggak pernah mengambil jaminan yang sudah ditulis oleh peminjam dalam surat pengakuan hutang, kami hanya ingin uang pinjaman itu kembali karena uang tersebut akan diputar untuk masyarakat sini yang membutuhkan pinjaman”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan peminjam. Berikut hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Jumani, mengatakan bahwa :

“tidak pernah mas, ada uang langsung saya bayar biar gak ribet”
(wawancara tanggal 3 November 2012)

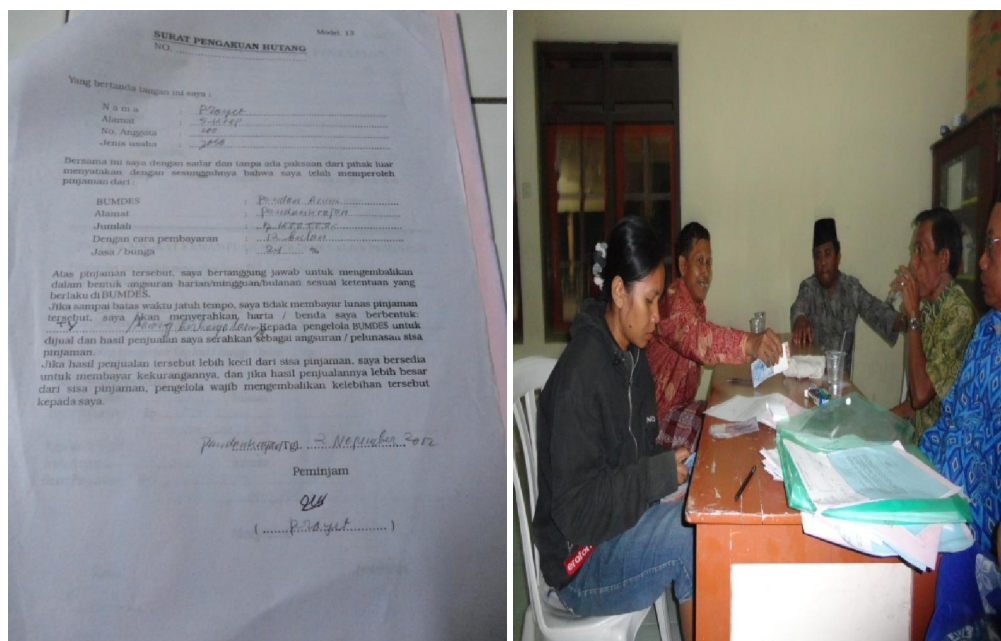
Sedangkan bapak paio yang pernah menunggak dalam angsuran pembayaran pinjaman, mengatakan bahwa:

“iya dulu saya pernah telat bayar, karena belum ada uang”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk meringankan beban masyarakat dalam melakukan pembayaran pinjaman maka dapat diangsur setiap 1 bulan sekali dengan bunga 2% perbulan dan jika terdapat anggota yang menunggak dalam angsuran pembayaran pinjamannya maka pengurus BUMDes akan menegur peminjam dan jika tunggakannya melebehi batas waktu yang ditentukan pengurus BUMDes tidak dapat memberikan pinjaman baru sebelum pinjamannya dilunasi, sesuai dengan AD/ART BUMDes Desa Pandankrajan pasal 10 ayat 4.

Berikut gambar untuk memperkuat data primer diatas:

Gambar 4.4
Kartu Pengakuan Hutang dan Pemberian Pinjaman



Sumber : Kantor BUMDes Desa Pandankrajan 2012

Pinjaman hanya dapat diberikan untuk kegiatan ekonomi produktif dengan menekankan akses kelayakan usaha serta memperhatikan kemampuan, keinginan dan kesungguhan calon peminjam. Pinjaman dapat diberikan kepada anggota BUMDes dan masyarakat yang mempunyai usaha di Desa atau tergabung dalam kelompok usaha bersama. Pinjaman yang diberikan kepada peminjam disesuaikan dengan kemampuan dana BUMDes yang tersedia.

Sesuai dengan fokus, peneliti ingin mengetahui kejelasan tentang pemberian pinjaman yang ditetapkan oleh para pengelola BUMDes, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rofian Selaku Ketua BUMDes Desa Pandankrajan. Berikut hasil wawancaranya :

“sebenarnya kami hanya memberikan pinjaman untuk modal usaha masyarakat khususnya usaha kecil menengah agar bisa dikembangkan tetapi ada beberapa anggota yang pinjam untuk kebutuhan keluarganya”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal senada diungkapkan oleh Ibu Sulisni selaku Bendahara BUMDes desa Pandankrajan, mengatakan bahwa :

“tidak juga mas, ada beberapa anggota yang pinjam untuk memenuhi kebutuhan keluarga”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal tersebut dipertegas oleh Ibu Jami selaku sekretaris BUMDes desa Pandankrajan, mengatakan bahwa :

“ya memang kami memberikan pinjaman pada masyarakat yang punya usaha tapi ada yang pinjam untuk kebutuhan ekonomi keluarganya, dari 125 anggota ada 83 orang yang pinjam untuk modal usaha dan sisanya pinjam untuk kebutuhan ekonomi keluarganya”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal tersebut diperkuat oleh Ibu Henik selaku anggota bumdes yang melakukan pinjaman di BUMDes desa Pandankrajan, mengatakan bahwa :

“saya meminjam di bumdes untuk tambahan modal mengembangkan usaha tas saya yang sudah berjalan satu tahun ini”
(wawancara tanggal 3 November 2012)

Sedangkan Bapak Paiso selaku anggota BUMDes Desa Pandankrajan menyatakan bahwa :

“untuk kebutuhan keluarga saya”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BUMDes Desa Pandankrajan pasal 10 ayat 2 tentang pemberian pinjaman dengan urutan prioritas masyarakat yang mempunyai usaha di Desa atau tergabung dalam kelompok usaha bersama. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes juga memberikan pinjaman pada masyarakat yang yang tidak memiliki usaha. Untuk mengetahui kejelasan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rofian selaku Ketua BUMDes. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rofian:

“tugas kita disini kan untuk membantu masyarakat, kalau ada yang butuh pinjam untuk keperluan kebutuhan sehari-hari ya kami beri tapi kita lihat dulu kondisi orang itu, kalau pinjam untuk tambahan beli kendaraan ya kami tidak akan memberi pinjaman”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal tersebut dipertegas oleh Ibu Jami selaku sekretaris BUMDes desa Pandankrajan, mengatakan bahwa :

“melihat kondisi ekonomi masyarakat sini masih ada lumayan banyak warga kurang mampu, maka kami memutuskan untuk memberi pinjaman pada masyarakat yang kurang mampu”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Desa Pandankrajan juga memberikan pinjaman pada masyarakat yang membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan ekonomi karena BUMDes juga membantu masyarakat yang kesusahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian BUMDes yang diamanatkan dalam Perda Kabupaten Mojokerto No. 18 Tahun 2006 pasal 2.

Jumlah anggota BUMDes adalah 125 anggota dan anggota yang memiliki usaha terdapat 83 orang. Sesuai dengan fokus, peneliti ingin mengetahui bagaimana perkembangan usaha masyarakat yang pinjam dan terdaftar dalam anggota BUMDes, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rofian selaku ketua BUMDes Desa Pandankrajan, mengatakan bahwa:

“sejauh ini perkembangan usaha masyarakat ya Alhamdulillah mas, lumayan banyak lah yang sudah berkembang dengan baik, pendapatannya sudah ada peningkatan”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal tersebut dipertegas oleh Ibu Jami selaku Sekretaris BUMDes Desa Pandankrajan, mengatakan bahwa:

“usaha masyarakat sudah menunjukan perkembangan yang baik, dari 83 anggota yang memiliki usaha, ada sekitar 50 anggota yang saya nilai usahanya sudah ada peningkatan dan sisanya masih dalam proses karena usaha baru”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal tersebut diperkuat oleh Ibu Henik selaku anggota bumdes yang melakukan pinjaman di BUMDes desa Pandankrajan, mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah sekarang usaha saya ini sudah ada peningkatan karena sekarang sudah lumayan banyak pesanan”
(wawancara tanggal 3 November 2012)

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Parno selaku anggota bumdes yang melakukan pinjaman di BUMDes desa Pandankrajan, mengatakan bahwa :

“ya ini sudah mulai ada perkembangan mas, awalnya dulu saya cuma punya tambak ikan mujair dan sekarang saya akan membuat tambak lagi yang akan saya isi ikan lele dan gurami, sesuai dengan yang diinginkan pelanggan saya”

(wawancara tanggal 3 November 2012)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha masyarakat yang melakukan pinjaman di BUMDes untuk modal usaha, sudah ada peningkatan karena terdapat lebih 50 anggota yang usahanya sudah ada peningkatan.

Pemberian pinjaman dengan urutan prioritas anggota BUMDes yang memiliki kegiatan usaha. Untuk mengetahui peran BUMDes pada masyarakat yang tidak memiliki kegiatan usaha, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rofian Selaku Ketua BUMDes Desa Pandankrajan. Berikut hasil wawancaranya :

“kami telah memberi pelatihan pada masyarakat untuk mengelola sumberdaya yang tersedia di desa yaitu pengolahan jagung dijadikan kripik emping, tujuannya agar masyarakat bisa menjadikannya sebagai kegiatan usaha masyarakat”

(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal senada diungkapkan oleh Ibu Sulisni selaku Bendahara BUMDes Desa Pandankrajan, mengatakan bahwa :

“pengurus bumdes telah mengadakan pelatihan kewirausahaan pengelolaan jagung menjadi emping yang bisa diproduksi untuk camilan”

(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal tersebut dipertegas oleh Ibu Jami selaku Sekretaris BUMDes Desa Pandankrajan, mengatakan bahwa:

“pada bulan juni kemarin kami mengadakan kegiatan pelatihan

kewirausahaan pengolahan jagung dijadikan kripik emping. harapan kami setelah mengikuti pelatihan tersebut, masyarakat dapat menjadikannya sebagai kegiatan usaha dan kami akan membantu dengan memberi pinjaman modal pada masyarakat ingin mengembangkannya”

(wawancara tanggal 2 November 2012)

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat yaitu Ibu Jumani, mengatakan bahwa :

“iya saya ikut pelatihan membuat kripik emping dari jagung”
(wawancara tanggal 3 November 2012)

Dari pengamatan uraian wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Desa Pandankrajan telah memalakukan pelatihan kewirausahaan pada masyarakat dan masyarakat yang ingin melakukan kegiatan usaha setelah mengikuti pelatihan tersebut, BUMDes akan membantu dengan memberi bantuan pinjaman modal.

Berikut gambar untuk memperkuat data primer diatas:

Gambar 4.5
Usaha Masyarakat Desa Pandankrajan



Dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BUMDes Desa Pandankrajan pasal 8 tentang kegiatan BUMDes, bahwa selain menerima simpanan dan memberikan pinjamanm, BUMDes juga menerima pinjaman dari lembaga – lembaga / kelompok masyarakat. Dalam hal ini peneliti tidak menemukan adanya BUMDes menerima pinjaman dari lembaga – lembaga / kelompok masyarakat. Untuk memperkuat hasil tersebut Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rofian Selaku Pengurus BUMDes Desa Pandankrajan, mengatakan bahwa :

“sampai saat ini kami tidak menerima pinjaman dari lembaga lain dan kami juga tidak mencari pinjaman ke lembaga lain, karena modal yang sudah kami peroleh itu sudah cukup untuk memberikan bantuan pinjaman kepada masyarakat”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Hal tersebut dipertegas oleh Ibu Jami selaku sekretaris BUMDes Desa Pandankrajan, mengatakan bahwa :

“dari awal pendirian bumdes sampai sekarang kami ndak menerima pinjaman dari lembaga lain, tapi jika sewaktu – waktu kami butuh untuk tambahan modal ya kami akan mencari pinjaman ke lembaga lain”
(wawancara tanggal 2 November 2012)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Desa Pandankrajan belum pernah menerima pinjaman dari lembaga – lembaga / kelompok masyarakat, karena BUMDes sudah memiliki modal yang cukup untuk mengelola pemberian pinjaman kepada masyarakat.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan temuan di lapangan dalam bentuk dokumen, arsip dan kejadian atau peristiwa, kegiatan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandankrajan

Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Maka dapat dilakukan analisis data dalam pembahasan yang akan di uraikan secara berurutan sesuai fokus penelitian sebagai berikut.

4.3.1 Simpanan

1. Simpanan Pokok Anggota

Temuan dalam hasil yang menyatakan bahwa simpanan pokok anggota sebesar Rp 10.000 dan juga dibayarkan oleh anggota dengan jumlah yang sama. Dalam hasil temuan, terdapat anggota yang membayar secara tunai dan juga ada yang membayarnya diangsur. Hal tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pandankrajan pasal 7 ayat 1a yang menjelaskan bahwa simpanan pokok adalah simpanan yang harus dibayar oleh setiap anggota sebesar Rp 10.000,-. Simpanan pokok dapat dibayar secara tunai atau angsuran 2 kali sebulan sejak permohonan menjadi anggota.

Dari temuan hasil bahwa pelaksanaan simpanan pokok anggota BUMDes Desa Pandankrajan sudah diimplementasikan sesuai dengan yang diamanatkan dalam AD/ART BUMDes Desa Pandankrajan pasal 7 ayat 1a. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rippley dan Franklin dalam Tangkilisan (2003:21) menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga faktor, yaitu :

- a. Perspektif kepatuhan yang mengukur implementasi kebutuhan aparatur pelaksana.

- b. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.
- c. Implementasi yang berhasil mengarah pada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

Simpanan pokok anggota ini merupakan upaya BUMDes untuk menambah modal, karena BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3).

Pengurus dan anggota BUMDes melakukan perannya untuk mengumpulkan modal pengelolaan BUMDes, dalam hal ini sesuai dengan teori pengertian Sorjono Soekanto (2002:243) merupakan aspek dinamisasi kedudukan (status), apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

2. Simpanan Wajib Pinjam

Temuan dalam hasil yang menyatakan bahwa simpanan wajib pinjam ini diambil dari peminjam, dimana pokok pinjamannya

dipotong 3%. Hal tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pandankrajan pasal 7 ayat 1b yang menjelaskan bahwa setiap peminjam pada BUMDes wajib menyetor simpanan wajib pinjam. Besarnya simpanan wajib pinjam ditetapkan minimal 3% (tiga persen) dari pokok pinjaman.

Dari temuan hasil bahwa pelaksanaan simpanan wajib pinjam BUMDes Desa Pandankrajan sudah diimplementasikan sesuai dengan yang diamanatkan dalam AD/ART BUMDes Desa Pandankrajan. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rippley dan Franklin dalam Tangkilisan (2003:21) menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga faktor, yaitu :

- a. Perspektif kepatuhan yang mengukur implementasi kebutuhan aparatur pelaksana.
- b. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.
- c. Implementasi yang berhasil mengarah pada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

Simpanan wajib pinjam ini merupakan upaya BUMDes untuk menambah modal karena BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada

pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3).

Pengurus dan anggota BUMDes melakukan peranannya untuk mengumpulkan modal pengelolaan BUMDes, dalam hal ini sesuai dengan teori pengertian peran menurut Sorjono Soekanto (2002:243) merupakan aspek dinamisasi kedudukan (status), apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

3. Simpanan Sukarela

Temuan dalam hasil yang menyatakan bahwa simpanan sukarela ini merupakan tabungan anggota dan masyarakat yang disimpan di BUMDes, dimana anggota dan masyarakat yang menabung di BUMDes akan mendapat bunga 1% perbulan. Hal tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pandankrajan pasal 7 ayat 1c yang menjelaskan bahwa BUMDes menerima simpanan sukarela dari anggota dan masyarakat dengan imbalan bunga / jasa 1% dari saldo terendah dalam bulan yang bersangkutan dan dapat diambil sewaktu – waktu.

Dari temuan hasil bahwa pelaksanaan simpanan sukarela di BUMDes Desa Pandankrajan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pengurus BUMDes Desa Pandankrajan, karena masyarakat tidak melakukan simpanan sukarela di BUMDes, hanya

terdapat 1 orang yang melakukan simpanan sukarela. Jadi implementasi mengenai kebijakan simpanan sukarela belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan BUMDes Desa Pandankrajan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Menurut Peters dalam tangkilisan (2003 : 22) mengatakan implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa faktor yaitu:

a. Informasi

Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada pra pelaksana dari kebijakan yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil dari kebijakan.

b. Isi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau kebijakan atau ketidaktepatan dan ketidaktegaasan intern maupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

c. Dukungan

Akan implementasi kebijakan publik akan sangat sulit apabila pelaksanaanya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor implementasi dan juga mengenal organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang.

Simpanan sukarela ini merupakan upaya BUMDes untuk menambah modal. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat melalui simpanan sukarela belum terpenuhi. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3).

Simpanan sukarela ini merupakan upaya BUMDes untuk menambah modal serta menyimpan uang tabungan anggota dan masyarakat untuk ditabung di BUMDes. Peran BUMDes dalam menghimpun dana masyarakat melalui simpanan sukarela belum bisa terpanuhi, seperti hal yang disampaikan oleh Sorjono Soekanto (2002:243) peran merupakan aspek dinamisasi kedudukan (status), apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

4.3.2 Pinjaman

Temuan dalam hasil menyatakan bahwa BUMDes memberikan pinjaman pada masyarakat setiap satu bulan sekali dengan memberi batasan pada 15 orang yang dapat mengajukan pinjaman, hal tersebut dilakukan karena memperhatikan dana BUMDes yang tersedia, sesuai dengan AD/ART BUMDes Desa Pandankrajan pasal 10 ayat 1. Hal ini

pengurus BUMDes melaksanakan hak dan kewajibannya dalam mengelola kegiatannya, sesuai dengan pengertian peran menurut Sorjono Soekanto (2002:243) merupakan aspek dinamisi kedudukan (status), apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Dalam hal ini pengurus BUMDes telah mengimplementasikan Anggaran Dasa dan Rumah Tangga BUMDes Desa Pandankrajan pasal 10 ayat 1 yaitu pemberian pinjaman ditetapkan oleh para pengelola BUMDes dengan memperhatikan kemampuan dana BUMDes yang tersedia.

Temuan dalam hasil menyatakan bahwa jika terdapat anggota yang menunggak dalam angsuran pembayaran pinjamannya maka pengurus BUMDes akan menegur peminjam yang menunggak. Hal ini pengurus BUMDes melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pengurus BUMDes, sesuai dengan pengertian peran menurut Sorjono Soekanto (2002:243) merupakan aspek dinamisi kedudukan (status), apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Jika tunggakannya melebebihi batas waktu yang ditentukan, pengurus BUMDes tidak dapat memberikan pinjaman baru sebelum pinjaman sebelumnya dilunasi. Dalam hal ini pengurus BUMDes telah mengimplementasikan Anggaran Dasa dan Rumah Tangga BUMDes Desa Pandankrajan pasal 10 ayat 4 yaitu bagi peminjam yang menunggak tidak dapat diberi pinjaman baru sebelum melunasi pinjamannya.

Temuan dalam hasil menyatakan bahwa untuk meringankan beban masyarakat dalam melakukan pembayaran pinjaman, maka dapat diangsur setiap 1 bulan sekali dengan bunga 2% perbulan. Hal ini merupakan suatu upaya BUMDes untuk meringankan masyarakat, sesuai dengan pendapat Kartasasmita dalam Mashoed (2004:46), upaya – upaya dalam pemberdayaan masyarakat yaitu Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakkan kepada yang lemah sangat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal ini justru akan menglunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat dari sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah masyarakat tidak dijadikan objek berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek upaya pembangunan sendiri.

Temuan dalam hasil menyatakan bahwa BUMDes memberikan pinjman pada masyarakat yang memiliki kegiata usaha sesuai dengan yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BUMDes Desa Pandankrajan pasal 10 ayat 2 yaitu pemberian pinjaman dengan urutan prioritas masyarakat yang mempunyai usaha di Desa atau tergabung dalam kelompok usaha bersama

Selain itu BUMDes juga memberikan pinjaman pada masyarakat yang membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan ekonomi

masyarakat. Pernyataan ini tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BUMDes Desa Pandankrajan pasal 10 ayat 2b yaitu pemberian pinjaman dengan urutan prioritas masyarakat yang mempunyai usaha di Desa atau tergabung dalam kelompok usaha bersama. Akan tetapi hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDes yang terdapat dalam Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 18 Tahun 2006 pasal 2.

1. Maksud pendirian BUMDes adalah guna memberdayakan potensi desa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Desa yang mandiri serta mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.
2. Tujuan pendirian BUMDes adalah :
 - a. Untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Desa dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
 - b. Untuk meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran;
 - c. Untuk membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Desanya.

Temuan dalam hasil menyatakan bahwa adanya peningkatan pendapatan masyarakat serta terbantunya perekonomian masyarakat yang mendapat bantuan pinjaman dari BUMDes. Dalam hal ini bahwa tercapainya maksud dan tujuan BUMDes yang ditetapkan dalam Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 18 Tahun 2006 pasal 2.

Dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat maka BUMDes telah menjalankan peranya dalam memberdayakan masyarakat sesuai dengan pendapat Kartasmita dalam Mashoed (2004:46) pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Temuan dalam hasil menyatakan bahwa BUMDes Desa Pandankrajan telah melakukan pelatihan kewirausahaan pada anggota yang belum memiliki usaha. Dalam hal ini BUMDes telah berupaya untuk memberdayakan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Kartasmita dalam Mashoed (2004:46), upaya – upaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga tahap, antara lain :

- a. Menciptakan suasana atau iklim tolaknya yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang. Disini titik tolaknya bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
- b. Memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat (Empowering). Dalam rangka ini perlu langkah-langkah yang lebih positif, Selain menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini

merupakan / meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

c. Pemberdayaan mengandung pula arti melindungi (Protecting)

Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakkan kepada yang lemah sangat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal ini justru akan menglunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat dari sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah masyarakat tidak dijadikan objek berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek upaya pembangunan sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka di akhir laporan ini dapat disimpulkan hasil penelitian berdasarkan analisa data dan hasil pengamatan untuk fokus penelitian dengan berpedoman pada kerangka berfikir, sebagai berikut:

1. Simpanan

a. Simpanan Pokok Anggota

simpanan pokok adalah simpanan yang harus dibayar oleh setiap anggota sebesar Rp 10.000,-. Simpanan pokok dapat dibayar secara tunai atau angsuran 2 kali sebulan sejak permohonan menjadi anggota. Jumlah simpanan pokok anggota BUMDes dari 125 anggota terdapat Rp 1.250.000.

b. Simpanan Wajib Pinjam

simpanan wajib pinjam adalah simpanan yang harus dilakukan oleh setiap peminjam pada BUMDes wajib menyetor simpanan wajib pinjam. Besarnya simpanan wajib pinjam ditetapkan minimal 3% (tiga persen) dari pokok pinjaman. Jumlah simpanan wajib pinjam yang terkumpul di BUMDes dari 125 anggota terdapat Rp 18.281.000.

c. Simpanan Sukarela

simpanan sukarela adalah simpanan yang dilakukan oleh anggota dan masyarakat dengan imbalan bunga / jasa 1% dari saldo terendah dalam bulan yang bersangkutan dan dapat diambil sewaktu – waktu. Jumlah simpanan wajib pinjam yang terkumpul di BUMDes dari 1 anggota yang melakukan simpanan sukarela yaitu Rp 4.500.000.

Simpanan anggota ini merupakan upaya BUMDes untuk mengumpulkan modal agar kegiatannya dalam memberdayakan masyarakat melalui pemberian pinjaman dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Selain modal yang didapat dari masyarakat BUMDes juga menerima bantuan modal dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan modal lain dari Anggaran Dana Desa. Modal yang terkumpul dari simpanan anggota sebesar Rp 24.031.000.

2. Pinjaman

Pemberian pinjaman yang sudah terealisasi Rp 144.000.000 yang diberikan pada 88 anggota. BUMDes memberikan pinjaman pada masyarakat setiap satu bulan sekali. Jadi, masyarakat yang membutuhkan pinjaman harus menunggu waktu yang sudah ditentukan oleh pengelola BUMDes.

Pinjaman tidak dapat diberikan pada masyarakat yang pinjamannya belum dilunasi. Pelunasan pinjaman dapat diangsur

setiap bulan dengan bunga 2% perbulannya, batas waktu pelunasannya yaitu selama satu tahun. Pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Simpanan

a. Simpanan Pokok Anggota

Perlu disediakan papan informasi dikantor BUMDes agar masyarakat lebih mengetahui tentang pembayaran simpanan pokok sebagai syarat untuk mendaftar menjadi anggota BUMDes dimana simpanan tersebut digunakan sebagai modal BUMDes.

b. Simpanan Wajib Pinjam

Perlu disediakan papan informasi dikantor BUMDes agar masyarakat lebih mengetahui tentang pembayaran simpanan wajib, dimana simpanan tersebut digunakan sebagai modal BUMDes.

c. Simpanan Sukarela

Pengurus BUMDes untuk selalu memberi penjelasan pada masyarakat mengenai budaya rajin menabung agar masyarakat tidak boros dalam pengeluarannya.

2. Pinjaman

Kalau bisa pemberian pinjaman bisa tersedia setiap hari dan tidak harus menunggu waktu satu bulan masyarakat dapat mengajukan pinjaman.

Jika suatu saat modal BUMDes mengalami kekurangan, perlu melakukan pinjaman kepada pihak lain misalkan bank, agar kegiatan BUMDes dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BUMDes (BUMDes) Desa Pandankrajan.
- Ar.Mustopadidjaja. 2003. Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem
Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 2007.
- Jamasy, Owin. 2004. Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan
Kemiskinan. Jakarta : Belantika
- Keputusan Kepala Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto
Tentang Penetapan Pengurus / Pengelola (BUMDes) Desa Pandankrajan
Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto.
- Mashoed, Dr, Msi. 2004. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Membuka Kawasan
Terisolasi. Surabaya : Papyrus
- Miles, Matthew B and Hubberman, Michael A. 1992. Analisis Data Kualitatif.
Jakarta.Surabaya: Papyrus.
- Moleong, LJ. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja
- Nugroho, Riant, 2003, Kebijakan Publik (Konsep, Implementasi, dan Evaluasi),
Jakarta: Gramedia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 18 Tahun 2006 Tentang
Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat.
Bandung: PT Refika Aditama
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta:
Lukman Offset YPAPI
- Wrihatmolo RR, Dwidjowijoto RN. 2007. Manajemen pemberdayaan. Jakarta: PT
Elex Media Komputindo